

DAFTAR PUSTAKA

Arsana, I Made Andi, 2006. *Arti Penting Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah*, artikel dalam <http://geopolitical.boundaries.blogspot.com>

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penetapan Batas Wilayah*, Disampaikan dalam Seminar Nasional peringatan setengah abad Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 26 Juni 2009

I Wayan Suandra. *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1991

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta

"Menyoal Sengketa Batas Wilayah" diunduh 11 Maret 2012, dalam <http://www.bpn.go.id>. A

Mulyo Putro, No. 4 Oktober – Desember 2002, *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Masalah-masalah Hukum Volume XXI

Sengketa 3 Blok, Bantul Kirim Surat ke Kemendagri" diunduh 15 Maret 2012, dalam <http://kr.jogja.com>.

Tauchid, Mochamad, 1952. *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Jakarta: Tjakrawala.

Tim Penyusun, 2007, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Wiradi, Gunawan, 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum Berakhir*, Yogyakarta: Insist, KPA dan Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2006 tentang Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Maklumat Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah Kelurahan di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/87/SJ tanggal 12 Januari 2005 tentang Permasalahan Batas Daerah Antar Daerah

Peraturan Pemerintah-Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Peraturan Dasar
Tata Tertib

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang
Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang
Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang
Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1970 tentang
Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1971 tentang
Pemerintahan